KAJIAN RESPON PERMINTAAN PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP KENAIKAN BIAYA KULIAH DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KOTA MALANG (STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Mahardynastika Nindya Hapsari
Tyas Danarti Hascaryani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: nastikahapsari@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat permintaan pendidikan tinggi di Kota Malang secara potensial dan efektif meningkat dari tahun ke tahun setidaknya dalam 7 tahun terakhir. Sebagai barang ekonomi, tingkat permintaan pendidikan tinggi ditentukan dengan tingkat pendapatan dan harga atau biaya atas jasa pendidikan itu sendiri. Pendapatan masyarakat yang ditunjukkan melalui PDRB per kapita di Indonesia mengalami konsistensi kenaikan dari tahun ke tahun, demikian juga dengan biaya kuliah, setiap tahun selalu mengalami kenaikan atau inflasi. Respon permintaan terhadap kenaikan pendapatan masyarakat secara umum dan biaya kuliah ditunjukkan melalui koefisien elastisitas pendapatan dan harga dari permintaan pendidikan tinggi.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif, hasil yang ditemukan adalah kecenderungan pendidikan tinggi menjadi barang mewah berdasarkan elastisitas pendapatannya dan sifatnya inelastis terhadap perubahan harga. Berdasarkan karakteristik elastisitas pendapatan dan harganya, pendidikan tinggi dipandang sebagai barang investasi yang mana konsumen bersedia menginvestasikan sejumlah uangnya dengan harapan akan menerima *return* di kemudian hari. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa permintaan pendidikan tinggi memiliki pola yang substitutif antar institusi, keberadaan kelebihan permintaan yang melanggengkan jalur *non-reguler*, dan posisi konsumen sebagai *price taker* yang mengakibatkan daya tawarnya lemah dalam pasar.

Kata kunci: permintaan, pendidikan tinggi, elastisitas pendapatan dan harga

---

A. LATAR BELAKANG

Sektor pendidikan tinggi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2011, terdapat sekitar 3.011 institusi pendidikan tinggi yang tersebar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa terdaftar sekitar 4.337.039 orang dari jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral. Jumlah mahasiswa tersebut meningkat 1,29% dibanding tahun 2009 yang tercatat sejumlah 4.281.695 orang (Statistik Peguruan Tinggi Kemendiknas). Tingkat partisipasi siswa pada level pendidikan tinggi juga terus meningkat setidaknya dalam satu dekade terakhir (2000-2010). APM dihitung berdasarkan 'jumlah siswa sekolah kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu' dibagi dengan 'jumlah penduduk usia tertentu'.APM untuk pendidikan tinggi misalnya, dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa pada kelompok usia mahasiswa (19-24 tahun) dibagi dengan jumlah penduduk usia mahasiswa (19-24 tahun).

Tingkat penyerapan partisipasi untuk setiap jenjang yang lebih tinggi terutama dari jenjang Sekolah Menengah Atas ke Perguruan Tinggi. Fenomena yang menarik adalah besarnya *lag* antara partisipasi pendidikan pada tingkat SMA dan Perguruan Tinggi. Setidaknya dalam lima tahun terakhir, jumlah kenaikan partisipasi murni di tingkat SMA lebih besar dibandingkan kenaikan partisipasi murni di tingkat perguruan tinggi, akibatnya *lag* yang tercipta antara APM SMA dan Perguruan Tinggi semakin besar setiap tahunnya

Salah satu komponen pembentuk APM adalah jumlah mahasiswa terdaftar (yang kemudian difilter berdasarkan umur). Berdasarkan data yang tersedia, jumlah mahasiswa terdaftar terus mengalami kenaikan setidaknya sejak tahun ajaran 2006/2007. Kenaikan jumlah mahasiswa

tersebut turut disertai dengan kenaikan pengeluaran untuk pendidikan tinggi yang ditunjukkan melalui *expenditure per student of terciary education.*

Expenditure per Student untuk pendidikan tersier menggambarkan persentase pendapatan per kapita yang digunakan untuk membiayai satu orang mahasiswa. *Expenditure per student of terciary education* dihitung dengan menjumlahkan total pengeluaran sektor pendidikan dibagi jumlah mahasiswa yang berpartisipasi pada pendidikan tinggi kemudian dipersentasekan terhadap pendapatan per kapita (GDP dibagi jumlah penduduk). Dari data yang tersedia, nampak bahwa *expenditure per studentof terciary education* meningkat sejak tahun 2008.

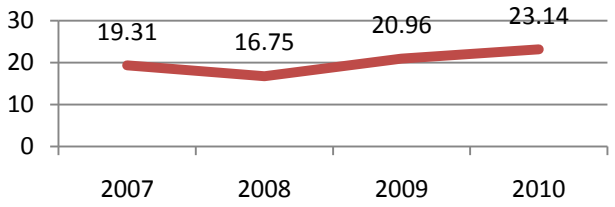

Gambar 1. *Expenditure per Student* untuk Pendidikan Tersier

Expenditure per student yang diwujudkan dalam bentuk persentase dari PDB per kapita meningkat dari 20,96 pada tahun 2009 ke 23,14 pada tahun 2010. *Expenditure per student* menggambarkan secara rinci dan menyeluruh atas beban mahasiswa selama studi di lembaga pendidikan. Beban unit cost setiap mahasiswa tersebut, akan ditandingkan (*matching*) dengan subsidi pendidikan pemerintah, sumbangan (partisipasi) masyarakat, dan pendapatan lain-lain lembaga, sehingga dapat diketahui beban yang harus ditanggung oleh mahasiswa selama studi (Fattah dalam Juanda dan Lestari 2012).

Duchesne dan W. Nonneman dalam *The Demand for Higher Education in Belgium* (2000) mengemukakan bahwa spesifikasi permintaan pendidikan dapat diderivasikan menggunakan teori neoklasik standar mengenai perilaku konsumen. Konsumen memilih barang dan jasa yang memberikan mereka kemungkinan utilitas tertinggi dengan *budget constraints* yang mereka miliki. Seperti semua barang dan jasa konsumsi, permintaan untuk pendidikan tinggi sangat berviasi tergantung pada pendapatan dan harga. Permintaan memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Sementara itu, Todaro dan Smith dalam Pembangunan Ekonomi (2006) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang, walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat non pasar, secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya.

Penawaran pendidikan tidak tak terbatas, ada *proxy* berupa pagu yang mengakibatkan adanya interaksi antara *supply* dan *demand* Clotfelter (1991) dalam Economic Challenges in Higher Education menjelaskan bahwa ada dua macam institusi pendidikan yaitu "*nonselective*" dan *"selective"*. *Nonselective* mengikuti mekanisme *open admissions policy*, menerima semua pendaftar yang mereka anggap *qualified*, sementara *selective institutions* menolak beberapa pendaftar meskipun sama-sama *qualified* karena alasan kapasitas atau pagu.Kebanyakan, perguruan tinggi di Indonesia berbentuk *selective institutions* karena masing-masing perguruan tinggi dibatasi oleh pagu. Interaksi penawaran dan permintaan pendidikan tinggi dapat digambarkan oleh data pagu dan peminat seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

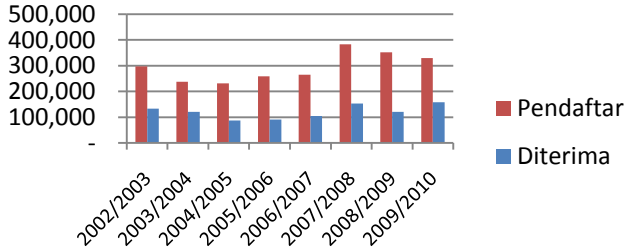

Gambar 2. Jumlah Mahasiswa Pendaftar pad Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Jatim

Data di atas merupakan data jumlah mahasiswa dan pendaftar untuk setiap tahun. Terdapat kelebihan permintaan untuk studi pendidikan tinggi yang ditunjukkan dengan selisih jumlah pendaftar dan jumlah mahasiswa diterima. Kelebihan permintaan ini disebabkan karena adanya batasan pagu yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan tinggi.

Jika harga penawaran tidak terpengaruh kuantitas barang yang diminta karena sudah ditetapkan di awal, maka yang berperan penting dalam terciptanya ekuilibrium adalah sisi permintaan. Sisi permintaan ini salah satunya dipengaruhi oleh biaya pendidikan. Todaro dan Smith dalam Pembangunan Ekonomi 2006 mengemukakan bahwa dari sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni (1) harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang (hal ini merupakan manfaat pendidikan individual) bagi siswa dan/atau keluarganya; serta (2) biaya-biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan / atau keluarganya.

Hubungan antara biaya perguruan tinggi dan pendapatan dengan permintaan pendidikan tinggi dapat diketahui melalui hitungan elastisitas harga dan pendapatan dari permintaan pendidikan tinggi yang nantinya akan menunjukkan pendidikan tinggi terklasifikasi sebagai barang apa berdasarkan elastisitasnya (barang normal, inferior, atau giffen). Elastisitas permintaan terhadap biaya pendidikan tinggi ini penting diketahui karena nantinya dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan bentuk kebijakan pembiayaan bidang pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu tujuan sekaligus sarana dalam pembangunan.

Penelitian terdahulu dan penjabaran data-data yang telah disampaikan di atas menunjukkan bahwa ada hubungan antara permintaan pendidikan dengan biaya pendidikan. Hubungan antara kedua variabel ini akan menunjukkan elastisitas atas barang terkait yaitu pendidikan tinggi.

B. KERANGKA TEORI

Pendidikan Tinggi Sebagai Barang Publik Tidak Murni

Pada teori ekonomi publik, pendidikan merupakan salah satu bagian dari barang publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena ada indikasi kegagalan pasar pada sektor pendidikan, sama halnya dengan kesehatan. Rosen dan Gayer (2008) mengemukakan bahwa dalam pendidikan terdapat indikasi kegagalan pasar yang disebabkan oleh keberadaan eksternalitas. Eksternalitas dalam pendidikan ini dihubungkan dengan adanya keuntungan suatu negara jika memiliki rakyat yang terdidik. Keberadaan rakyat yang terdidik memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Pendidikan sebagai barang publik bisa diartikan bahwa ketersediaannya dijamin oleh pemerintah. Jaminan pemerintah atas keterseediaan pendidikan bisa melalui berbagai bentuk misalnya berupa penyediaan sarana dan prasarana maupun berupa penyediaan pembiayaan seperti yang dikemukakan Stiglitz (2000:427) "Pendidikan dikatakan sebagai barang publik bukan karena keharusan pemerintah dalam memproduksinya tetapi keharusan pemerintah dalam membiayai." Keharusan pemerintah dalam membiayai ini dikarenakan tidak adanya lembaga keuangan atau *private lenders* yang bersedia memberikan pinjaman untuk membiayai pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mendasar tentang pentingnya bantuan publik dalam pembiayaan pendidikan. Rosen dan Gayer (2008) menambahkan bahwa sangat sulit menyediakan jaminan atas pinjaman untuk investasi modal manusia (*human capital investment*) yang akan digunakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya.

Stiglitz (2000) dalam *Economics of The Public* menyatakan bahwa kebanyakan orang tua memandang bahwa pengeluaran mereka untuk pendidikan anak pada level pendidikan dasar dan menengah sifatnya berupa kerelaan (*altruistically*), tetapi ada juga sebagian orang tua yang tidak memiliki pandangan demikian. Jika pembiayaan pendidikan dijalankan dengan mekanisme *privately financed* (atas biaya sendiri), maka akan ada siswa yang tidak menerima pendidikan dengan cukup yakni mereka yang orang tuanya memandang bahwa pengeluaran untuk pendidikan bukanlah semata-mata karena kerelaan. Jadi, dasar pemikiran atas bantuan publik terhadap pendidikan adalah adanya keyakinan bahwa akses anak-anak untuk pendidikan tidak harus tergantung pada kemampuan finansial orang tua atau rasa pengorbanan yang dimiliki oleh orang tuanya karena pendidikan memiliki eksternalitas positif bagi masyarakat. Dengan demikian, peran

publik sangat dibutuhkan dalam pembiayaan pendidikan terutama untuk pendidikan dasar dan menengah sementara pendidikan tinggi melalui *extensive financial support*.

Meskipun pendidikan termasuk pada salah stau barang publik yang diakibatkan dengan adanya eksternalitas, tingkat kemurnian barang publik sudah berkurang jika dilihat berdasarkan cirinya yang *non-rivalry* dan *non-excludable.* Hal ini sejalan dengan pemikiran Rosen dan Gayer (2008) yang mengemukakan bahwa jika ditinjau berdasarkan ciri barang publik yang *non-rivalry* dan *non-excludable*, pendidikan tidak sesuai dengan kedua ciri ini. Ada persaingan dalam berkonsumsi misalnya kenaikan jumlah siswa menyebabkan masing-masing siswa mendapatkan perhatian secara individual yang kurang dari gurunya, kelas menjadi ramai, dan adanya kesulitan-kesulitan lain untuk mendapatkan sumber daya pendidikan. Tidak seperti barang yang sifatnya *nonrival* yang bebas biaya marjinal. Pada pendidikan ada tambahan biaya untuk setiap tambahan konsumen. Pendidikan juga tidak bersifat *non-excludable* karena seseorang dapat dengan mudah mencegah seorang siswa untuk mendapatkan jasa yang disediakan oleh sebuah sekolah. Pendeknya, pendidikan pada dasarnya adalah barang privat yang memperbaiki kesejahteraan siswanya dengan mempertinggi kemampuan mereka untuk mendapatkan mata pencaharian.

Sebagai barang publik yang tidak murni, muncul beberapa pendapat mengenai intervensi pemerintah dalam pendidikan tinggi. Pertama, intervensi pemerintah atas pertimbangan besarnya manfaat dihasilkan pendidikan baik manfaat individual maupun kepada masyarakat (*social benefit*). Menurut Todaro dan Smith (2006: 453) manfaat individual merupakan kecenderungan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang. Sedangkan manfaat sosial merupakan manfaat dari pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Fisher (1996) dalam *State and Local Public Finance* menambahkan pendapat mengenai manfaat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi biasanya menghasilkan penelitian dan layanan publik di samping mendidik mahasiswa. Ketiga manfaat pendidikan ini dirasakan oleh mahasiswa. Khusus untuk penelitian dan layanan publik sebagai komponen output pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa tetapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pendidikan tinggi seharusnya dibiayai oleh pemerintah. Penelitian ilmiah murni diidentifikasikan sebagai barang publik klasik yang dapat digunakan oleh siapapun dengan biaya marginal sebesar nol pada masyarakat. Dengan demikian seharusnya penelitian dan pelayanan publik dibiayai oleh masyarakat umum dan tidak langsung oleh siswa. Namun perlu diingat bahwa ada manfaat individual yang didapatkan oleh siswa, oleh karena itu siswa tetap dibebani uang kuliah (*tuition*).

Rosen dan Gayer (2008) memandang manfaat sosial dari perspektif lain. Manfaat sosial sebagai eksternalitas positif dari pendidikan diwujudkan dalam bentuk misalnya pemberian perspektif pemilih (pada pemilu) untuk mendasari pilihan politik mereka. Beberapa penemuan muncul untuk mendukung keberadaan manfaat sosial atas pendidikan salah satunya mengkorelasikan pendidikan dengan demokrasi yakni penambahan level pendidikan membawa pada partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Manfaat sosial dari pendidikan mungkin berbeda-beda pada tiap jenjangnya. Jika manfaat sosial dari pendidikan menunjukkan *diminishing marginal return*, maka pendidikan dasar dan menengah menggerakkan manfaat eksternal yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Keadaan semacam ini memberikan suatu saran bagi pemerintah untuk berintervensi lebih sedikit pada pendidikan tinggi dibanding jenjang-jenjang sebelumnya (pendidikan dasar dan menengah).

Selain meninjau dari segi manfaat eksternal, pendapat lain menambahkan bahwa tingkat intervensi pemerintah pada pendidikan juga perlu menimbang segi manfaat individual atau *private benefits*. Seperti yang diungkapkan Stiglitz (2000:443) Mereka yang mendapatkan *benefit* dari perguruan tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi, oleh karena itu bantuan pemerintah pada pendidikan tinggi sifatnya *regressive*.

Di Indonesia perbedaan peran pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi makin nampak karena mekanisme tata kelola yang berbeda. Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah pusat mengharuskan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada level pendidikan dasar dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut

adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Namun demikian, meskipun wajib belajar di Indonesia berlangsung selama sembilan tahun (SD hingga SMP), keberlangsungan Sekolah Menengah Atas (SMA) dijamin oleh pemerintah dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berbeda dengan Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi (dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri) sebelumnya dikelola dalam konsep BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang memiliki otonomi untuk segala aspek penyelenggaraannya sesuai dengan PP no 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum. Menurut Munadi dan Barnawi (2011) dalam Kebijakan Publik Bidang Pendidikan, keluarnya PP tentang BHMN ini merupakan wujud nyata pengurangan subsidi pemerintah untuk pendidikan. PP no 61 tahun 1999 tersebut kemudian digantikan dengan PP no 17 tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Pembentukan Badan Hukum Pendidikan merupakan amanat dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional" yang mewajibkan penyelenggara pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan.

Yulida (2010) memaparkan bahwa pengertian Badan Hukum Pendidikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan adalah Badan Hukum yang menyelengarakan pendidikan formal, sedangkan fungsi dari Badan Hukum Pendidikan yaitu memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan lembaga pendidikan. Badan Hukum Pendidikan memiliki organ-organ pendukung yang memiliki fungsi masing-masing dalam pelaksanaan Badan Hukum Pendidikan yang memberikan pelayananan di bidang pendidikan pada jenjang pendidikan formal..

Dalam bentuk BHP, Perguruan Tinggi diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam bentuk portofolio dan badan usaha berbadan hukum untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk biaya operasional. Perguruan Tinggi sebagai BHP ini tata kelola keuangannya menggunakan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam UU tentang BHP ini biaya yang ditanggung mahasiswa maksimal sepertiga dari biaya operasional. Biaya Operasional menurut Badan Standar Nasional Pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti listrik, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya. Jadi besarnya tanggungan biaya mahasiswa tergantung pada besarnya biaya operasional dari Perguruan Tinggi.

Pada paparan teoritis di atas dapat dicermati bahwa ada beberapa perbedaan antara kasus pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi. Ditinjau dari tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan, pendidikan tinggi lebih sedikit terintervensi daripada pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan dari segi tata kelola, pendidikan tinggi lebih otonom daripada pendidikan dasar dan menengah. Perbedaan ini nantinya akan membawa perbedaan penawaran, permintaan, dan pembentukan harga dalam pendidikan pada setiap jenjangnya.

Penawaran Pendidikan Tinggi sebagai Barang Publik Tidak Murni

Todaro dan Smith (2006) berpendapat bahwa lebih penting untuk menganalisa faktor-faktor permintaan karena jika dilihat dari sisi penawaran, hampir keseluruhan jasa dan fasilitas pendidikan di berbagai negara disediakan oleh pemerintah. Penawaran pendidikan pada berbagai jenjang lebih banyak ditentukan oleh proses politik ketimbang kriteria ekonomi. Jadi dapat diasumsikan bahwa penawaran atau penyediaan tempat untuk pendidikan dibatasi oleh penegluaran pemerintah untuk sektor ini.

Pendapat lain dari Clotfelter, Ehrenberg, Getz, dan Siegfried (1991) dalam *Economic Challenges in Higher Education: Explaining the demand* bahwa kuantitas permintaan yang tercermin pada tingkat pendaftaran jumlahnya tergantung pada aspek penawaran juga. Pada sisi penawaran pendidikan tinggi, salah satu aspek penting dalam penawaran adalah "*non-price rationing*" atau dasar pemikiran non harga. Hal yang paling menonjol dari dasar pemikiran ini adalah penerapan kebijakan *selection admissions* atau yang lebih dikenal dengan istilah penyeleksian.

Ada dua hal penting yang didesain perguruan tinggi atau universitas untuk meningkatkan jumlah pendaftar dan kualitas mahasiswa yang diterima menurut Clotfelter (1991). Yang pertama adalah penyeleksian dan yang kedua adalah perekrutan. Penyeleksian merupakan proses *non-price*

rationing sedangkan perekrutan dapat dikatakan sebagai pemasaran yang dilakukan *supplier* (perguruan tinggi atau universitas) untuk mempengaruhi kurva permintaan.

Ada dua macam perguruan tinggi bila ditinjau dari segi penyeleksian yaitu *non-selective* dan *selective*. Dua macam perguruan tinggi ini nantinya akan memberikan kurva permintaan – penawaran yang juga berbeda. Perguruan tinggi *non-selective* menerapkan *open admission policy* yang artinya menerima semua kandidat yang dianggap *qualified* atau memenuhi persyaratan walaupun pada akhirnya akan menolak beberapa pendaftar yang *qualified* karena batasan kapasitas. Pada kasus semacam ini, masing-masing institusi seolah-olah menerima semua pendaftar yang *qualified*, menetapkan harga, hingga batasan kapasitasnya tercapai.

Mengutip pendapat Samuelson (1993) bahwa "kunci utama dalam penetapan penawaran adalah biaya produksi". Kemudian Mulyono (2010) mendifinisikan biaya produksi pendidikan sebagai harga pokok yang merupakan gambaran pengorbanan dalam pengertian kuantitatif pada saat barang atau jasa dipertukarkan. Di sisi lain dapat diartikan bahwa harga pokok merupakan nilai pengorbanan dalam pengertian uang yang diberikan kepada produksi yang melekat pada hasil produksi. Oleh sebab itu, harga pokok dapat diartikan pula sebagai pengorbanan biaya yang rasional, tidak dapat dihindarkan, dan memberikan kegunaan terhadap produksi.

Permintaan Pendidikan Tinggi Sebagai Barang Publik Tidak Murni

Menurut Todaro dan Smith (2006) ada dua hal yang dominan dalam mempengaruhi permintaan pendidikan yaitu harapan siswa akan pekerjaan dan biaya pendidikan. Sementara itu Leslie dan Brinkman dalam *Student Price Response in Higher Education: The Student Demands Studies* (1987) mengemukakan bahwa permintaan pendidikan sama dengan permintaan barang dan jasa pada umumnya. Pada teori permintaan, kuantitas atas barang yang diminta merupakan fungsi dari harga, pendapatan pembeli, harga atas barang dan / atau jasa yang lain, dan preferensi konsumen. Teori tersebut jika diaplikasikan pada pendidikan tinggi akan menghasilkan hal sebagai berikut: (1) tingkat pendaftaran memiliki hubungan negatif dengan harga yang dibebankan kepada mahasiswa, terutama biaya kuliah (*tuition*); (2) tingkat pendaftaran memiliki hubungan positif dengan tingkat pengeluaran pemerintah untuk bantuan pendidikan karena bantuan ini akan mengurangi harga bersih atau meningkatkan pendapatan mahasiswa. (3) pendaftaran pada suatu institusi akan memiliki hubungan positif dengan tingkat harga biaya kuliah yang dipatok oleh kompetitor, semakin tinggi kompetitor mematok harga maka semakin tinggi jumlah pendaftar pada institusi tersebut.

Clotfelter dalam *Economic Challenges in Higher Education: Explaining the Demand* (1991) memaparkan bahwa permintaan pendidikan dipengaruhi oleh nilai ekonomis potensial yang akan dikembalikan jika mengikuti pendidikan tinggi, biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi aspek konsumsi pada pendidikan tinggi. Pertama, nilai ekonomis potensial yang akan dikembalikan jika mengikuti pendidikan tinggi dapat diartikan sebagai *trade off* dalam mengikuti pendidikan tinggi. Jumlah penghasilan yang diterima oleh pekerja lulusan sekolah menengah atas dengan jumlah penghasilan yang diterima lulusan sarjana akan mempengaruhi ekspektasi masyarakat untuk menginvestasikan uang yang mereka miliki dalam pendidikan. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat kenaikan rata-rata lulusan sarjana dengan jumlah permintaan pendidikan tinggi, hal ini tidak cukup menjelaskan fenomena yang terjadi. Karena pada kenyataannya, terdapat beberapa kejadian yang tidak sesuai teori ini akibat dieleminasinya beberapa asumsi. Pada tahun 1970an di Amerika terjadi penurunan penghasilan relatif rata-rata untuk lulusan perguruan tinggi yang rupanya disebabkan karena kenaikan besar-besaran atas penawaran lulusan perguruan tinggi.

Faktor utama kedua yang mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi adalah biaya. Hal yang paling jelas dari biaya adalah uang kuliah dan biaya – biaya lain yang ditanggung oleh mahasiswa atau keluarganya, tetapi para ekonom juga mempertimbangkan pentingnya biaya implisit pada pendidikan tinggi yakni penerimaan yang dikorbankan (*forgone earnings*). Faktor penentu permintaan yang ketiga adalah pendapatan. Untuk kebanyakan komoditas, jumlah barang yang dikonsumsi akan naik seiring dengan kenaikan pendapatan. Pada kasus penerimaan mahasiswa, pendapatan tidak serta merta mempengaruhinya secara langsung. Pada *human capital model*, pendapatan tidak langsung muncul sebagai alasan seseorang untuk melakukan keputusan investasi pada pendidikan tinggi. Pada kenyataannya perguruan tinggi merupakan barang yang sangat elastis terhadap pendapatan. Beberapa studi mengenai permintaan pendidikan tinggi Galper dan Dunn 1969; Spies 1978; Bishop (1977); Corman (1983); dan Schwartz (1986) dalam Clotfelter

(1991) pada bukunya yang berjudul *Challenges in Higher Education* ditemukan adanya indikasi pengaruh pendapatan yang positif terhadap permintaan pendidikan tinggi secara konsisten (*consistently positive income effect*).

Schultz (1993), Becker (1993) dan Mincer (1974) dalam Duchesne dan Nonneman (2000) menambahkan bahwa permintaan pendidikan tinggi bisa dipandang melalui pembangunan teori modal manusia (*human capital theory*). Pendidikan dipandang sebagai barang modal. Mahasiswa menginvestasikan waktu dan uangnya sekarang dengan mengharapkan adanya *return* di masa yang akan datang. Return disini berarti potensi pendapatan lebih tinggi yang diterima mahasiswa jika ia mengenyam pendidikan tinggi. Teori modal manusia ini mampu menjelaskan secara rasional mengenai permintaan pendidikan. Biaya (baik langsung maupun tidak langsung) dan pendapatan di masa yang akan datang didiskontokan untuk menentukan tingkat permintaan pendidikan yang optimal.

Dalam menganalisis permintaan pendidikan tinggi, pendekatan konvensional tidak mampu sepenuhnya menjawab. Ada perpaduan pendekatan dalam studi mengenai permintaan pendidikan tinggi. Clotfelter (1991) menjelaskan bahwa mahasiswa dapat dikatakan sebagai peminta (*demanders*) dalam pasar. Jumlah pelamar menunjukkan jumlah mahasiswa yang rela membayar pada tingkat harga tertentu yang kemudian dapat disebut sebagai *demanders*. Mahasiswa mengorbankan kesempatan pekerjaan untuk mengikuti pendidikan tinggi, mereka membayar biaya implisit dengan istilah *forgone earnings*.

Pengintegrasian antara pendekatan konsumsi / investasi neoklasik dengan pendekatan modal manusia banyak dilakukan dalam berbagai penelitian mengenai permintaan pendidikan. Misalnya saja Kodde dan Ritzen (1984), konsumen memilih pendidikan yang optimal dengan dihadapkan problem mengenai rasionalisasi konsumsi saat ini dan masa yang akan datang dengan *budget constraint* yang telah ditentukan. Untuk menyelesaikan masalah semacam ini akan memunculkan teori bahwa permintaan individual atas pendidikan merupakan fungsi dari pendapatan, biaya langsung, biaya tak langsung, dan tingkat upah relatif (perbedaan upah antara pekerja yang bersekolah dengan pekerja yang tidak bersekolah).

Determinan Harga Pendidikan Tinggi

Meskipun tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh ekonomi neoklasik, harga pendidikan pada umumnya terbentuk atas interaksi antara penawaran dan permintaan. Clotfelter (1991) berpendapat bahwa pergeseran kurva permintaan dimana penawarannya tetap mengakibatkan kenaikan harga pada mekanisme *market clearing*. Meskipun nantinya harga yang ditetapkan perguruan tinggi di bawah tingkat harga pada *market clearing*, jika ada indikasi *excess demand* yang terus menerus yang ditunjukkan dengan pergeseran permintaan, maka yang terjadi adalah institusi diperbolehkan menaikkan harga tanpa ada efek yang merugikan.

Harga sebagai komponen biaya langsung atas pendidikan yang dimaksud di sini adalah jumlah biaya kuliah yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan / atau keluarganya. Di Indonesia (sesuai dengan UU nomor 9 tahun 2009), biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa ditetapkan maksimal sepertiga biaya operasional perguruan tinggi. Menurut Fisher (1996), harga untuk pendidikan tinggi yang diwujudkan dalam bentuk uang kuliah merupakan bentuk *user charges* atas barang publik. Keberadaan *user charges* ini terkait dengan manfaat dari pendidikan yang mana manfaat dari pendidikan dirasakan sekali oleh siswa. Mekanisme terbentuknya harga atas pendidikan tidak melalui proses tawar menawar atau tarik menarik *supply-demand* melainkan telah ditetapkan atau dipatok di awal seperti yang diungkapkan oleh Clotfelter (1991).

Jika harga didefinisikan sebagai biaya kuliah yang harus ditanggung mahasiswa di mana pada konstitusi telah ditegaskan bahwa maksimal besarannya adalah sepertiga biaya operasional, maka biaya operasional merupakan faktor utama yang mempengaruhi harga. Jika biaya operasional naik, maka harga juga akan naik. Namun, Getz dan Siegfried dalam *Challenges in Higher Education: Cost Inflation* memperjelas bahwa ada beberapa alasan mengapa perguruan tinggi menaikkan harga. Yang pertama adalah peningkatan mutu perguruan tinggi akibat pasar pendidikan yang *competitive*. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan calon mahasiswa. Harga naik bisa jadi disebabkan karena perbaikan mutu produksi dari perguruan tinggi.

Kedua adalah perbedaan *mixing* pada berbagai disiplin ilmu. Masing-masing disiplin ilmu menghabiskan biaya yang berbeda-beda, misalnya biaya di fakultas kedokteran relatif lebih besar daripada di fakultas budaya. Jika pada suatu tahun permintaan di fakultas kedokteran meningkat tajam dibanding di fakultas budaya, maka *aggregate cost* akan naik pula. Faktor lainnya yang

mempengaruhi perguruan tinggi untuk menaikkan harganya adalah kenaikan gaji dan kualitas manajemen perguruan tinggi dalam mengelola aset serta regulasi pemerintah yang menciptakan ekspektasi terhadap pendidikan tinggi.

Meskipun harga atau biaya pendidikan yang harus ditanguung mahasiswa dan / atau keluarganya mempengaruhi permintaan akan pendidikan tinggi, mekanisme pembentukan harga tidaklah secara serta merta dihasilkan atas tarik menarik permintaan dan penawaran artinya, bukan pasar melalui *invisible hand* yang membentuk harga. Pada kenyataannya, harga atas pendidikan ditetapkan di awal yang menurut ekonomi kelembagaan dijelaskan sebagai hasil atas *fixed-price* pada variasi kontrak. Bajari dan Tadelis dalam *Incentives versus Transaction Cost: a Theory of Procurement Contracts* (2001) mengemukakan bahwa penjual atau produsen memiliki informasi tentang biaya produksi yang mana pembeli atau konsumen tidak memilikinya. Kemudian hal ini berlanjut pada mekanisme *Fixed-Price*, dimana harga telah ditetapkan karena adanya asimetri informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak atas besaran biaya produksi.

Asimetri informasi dalam harga ini kemudian dalam ekonomi kelembagaan dijelaskan sebagai biaya transaksi. Yustika (2010) mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran. Dalam pendidikan, biaya-biaya yang tidak tercantum pada kontrak tetapi harus dibayarkan demi terwujudnya kontrak tersebut merupakan wujud dari biaya transaksi misalnya saja tambahan uang gedung akibat biaya proporsional yang besarannya tidak tertulis pada kesepakatan kontrak dan munculnya *fee-fee* lain yang tidak tertulis sebelumnya.

Elastisitas Harga dan Pendapatan dari Permintaan Pendidikan Tinggi

Respon permintaan pada pendidikan tinggi terhadap perubahan biaya kuliah dan pendapatan masyarakat ditunjukkan melalui perhitungan elastisitas harga dan pendapatan dari permintaan pendidikan tinggi. Pengukuran elastisitas akan memberikan pemahaman mengenai sensitivitas permintaan terhadap harga karena telah dibahas sebelumnya bahwa harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Menurut Nicholson (2002) "Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan suatu variabel yang disebabkan oleh 1 persen perubahan variabel lainnya." Sedangkan elastisitas harga dari permintaan adalah "Persentase perubahan jumlah yang diminta atas suatu barang yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sebesar satu persen". Perubahan harga barang (P) akan menyebabkan perubahan Q (kuantitas yang dibeli) dan elastisitas harga dari permintaan mengukur hubungan ini. Dalam bentuk matematis, elastisitas harga dari permintaan dinotasikan sebagai berikut:

$$e_{q,p} = \frac{Persentaseperubahan Q}{Persentaseperubahan P}$$

Seperti yang dikemukakan Leslie (1987), permintaan pendidikan tinggi memiliki hubungan yang negatif dengan harga. Artinya P dan Q bergerak dengan arah yang berlawanan. Menurut Nicholson (2002), jika P dan Q bergerak dengan arah yang berlawanan maka hasil perhitungan elastisitas akan negatif, namun yang digunakan dalam perhitungan elastisitas adalah nilai absolutnya. Jika barang tersebut barang normal, maka nilai koefisiennya adalah negatif karena kenaikan harga akan membawa dampak pada penurunan permintaan. Dimana jika $e_{q,p}$< -1 maka barang tersebut sifatnya elastis, kuantitas permintaan akan responsif terhadap kenaikan atau penurunan harga, jika $e_{q,p}$= -1 maka barang tersebut diterminologikan sebagai barang yang elastis uniter, persentase perubahan kuantitas sama dengan persentase perubahan harga, dan yang terakhir jika $e_{q,p}$>-1 barang tersebut dikategorikan sebagai barang inelastis, dimana jumlah barang yang diminta tidak responsif terhadap perubahan harga. Massy (1989) dalam Rothschild dan White (2008) menyatakan bahwa kebanyakan universitas adalah monopoli yang menghadapi permintaan inelastis sehingga mereka mampu menaikkan harga dengan landasan untuk mengakomodasi kenaikan biaya.

Penelitian Terdahulu

Pengkajian terhadap penelitian empiris terdahulu yang relevan dilakukan sebagai landasan pengembangan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

Gölpek (2012) menunjukkan bahwa permintaan akan pendidikan tinggi meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Hal ini disinyalir karena biaya pendidikan dipenuhi oleh sumber daya

publik. Penulis menggunakan manfaat individual (*private return* / *benefit*) dan sistem pembiayaan publik pada pendidikan tinggi yang merupakan faktor utama atas terbentuknya harga dan permintaan atas pendidikan tinggi. Data yang digunakan meliputi data *private return rates* di berbagai negara pada seluruh penjuru dunia. Hasil penelitian ini selaras dengan teori bahwa faktor-faktor dasar yang memperngaruhi permintaan pendidikan tinggi adalah biaya dan kenaikan penghasilan.

Sementara itu Savoca (1990) mengungkapkan bahwa dampak kenaikan harga terhadap tingkat pendaftaran pendidikan tinggi dua kali lebih besar daripada yang ada pada literatur. Pada penelitian ini ditemukan bahwa keputusan untuk mendaftar perguruan tinggi memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap biaya. Leslie dan Brinkman (1987) mengkomparasi berbagai temuan dan metode dalam menganilisis respon terhadap harga pada pendidikan tinggi. Hasil temuannya pun bervariasi tergantung pada model perhitungan. Misalnya hasil penelitian Campbell dan Siegel bahwa biaya kuliah telah naik 148 persen dari total kenaikan biaya langsung antara tahun 1927 hingga 1963. Sementara Jackson – Weathersby melihat respon harga melalui konversi elastisitas biaya kuliah dibandingkan dengan elastisitas biaya total (biaya kuliah dan *living cost*). Penelitian Leslie dan Brinkman sendiri mengikuti model yang dibangun oleh Jackson – Weathersby yang kemudian menunjukkan adanya penurunan permintaan setelah harga naik yakni: setiap kenaikan $100 pada biaya kuliah menurunkan 0.6 persentase poin pada tingkat partisipasi usia 18-24 tahun (partisipasi murni) dan permintaan (*enrollment*) turun 1.8 persen, *cateris paribus*.

Adanya penelitian terbaru mengenai permintaan pendidikan di dunia yang dilakukan oleh Gölpek (2012) dan berbagai penelitian lain tersebut yang mendukung mengenai respon harga terhadap permintaan pendidikan tinggi mendasari dikembangkannya penelitian mengenai elastisitas harga dari permintaan pada pendidikan tinggi di Kota Malang.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang berfokus pada pembahasan atas rumusan masalah. Penelitian deskriptif dapat menggambarkan suatu gejala sosial atau dapat dikatakan mampu menggambarkan sesuatu yang tengah terjadi pada saat penelitian ini berlangsung. Pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil pengolahan data-data yang digunakan dan didasarkan pada variabel-variabel yang dapat dijelaskan secara terukur.

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari penelitian ini, maka Kota Malang ditetapkan sebagai tempat penelitian. Adapun jumlah institusi perguruan tinggi yang diteliti sebanyak 2 universitas negeri di Kota Malang yakni Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya. Data yang digunakan adalah data tahunan yakni tahun 2006 hingga 2011 dimana tahun 2006 berdasarkan data yang tersedia merupakan tahun awal kenaikan jumlah mahasiswa sedangkan 2011 dipilih sebagai akhir tahun periode sehubungan dengan pemutakhiran data yang ada adalah pada tahun tersebut.

Dalam pengolahan data, rumus utama yang digunakan adalah rumus elastisitas seperti yang biasa digunakan dalam perhitungan mikroekonomi. Rumus perhitungan elastisitas yang dimaksud tersebut adalah elastisitas pendapatan dan elastisitas harga.

Elastisitas pendapatan dari permintaan didapatkan dengan cara membagi persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan perubahan pendapatan. Atau secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$e_{Q,I} = \frac{\frac{Q_1 - Q_0}{Q_0}}{\frac{I_1 - I_0}{I_0}}$$

Di mana $e_{Q,I}$ adalah elastisitas pendapatan dari permintaan, Q_1 dan I_1 adalah jumlah barang yang diminta dan besarnya pendapatan masyarakat pada tahun yang dihitung elastisitasnya sedangkan Q_0 dan I_0 adalah jumlah barang yang diminta dan besarnya pendapatan masyarakat pada tahun dasar atau tahun sebelumnya.

Demikian juga untuk perhitungan elastisitas harga. Elastisitas harga dari permintaan didapatkan dengan cara membagi persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan perubahan harga. Atau secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$e_{Q,P} = \frac{\frac{Q_1 - Q_0}{Q_0}}{\frac{P_1 - P_0}{P_0}}$$

$e_{Q,P}$ adalah elastisitas pendapatan dari permintaan, Q_1 dan P_1 adalah jumlah barang yang diminta dan tingkat harga pada tahun yang dihitung elastisitasnya sedangkan Q_0 dan P_0 adalah jumlah barang yang diminta dan tingkat harga pada tahun dasar atau tahun sebelumnya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif yang berfokus pada pendeskripsian data dan penjelasan momen. Metode deskriptif ini tidak berfokus pada peramalan secara ekonometri tapi lebih berfokus pada analisis atas implikasi penelitian.

Tahap awal dari penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilanjutkan dengan perhitungan atau olah data dan analisis data. Kemudian hasil olah data tersebut diuraikan implikasinya menggunakan *supporting data* dan analisis yang lebih mendalam. Pendalaman terhadap kerangka teori dan penelitian terdahulu juga dilakukan sebagai bahan komparasi pada hasil dan pembahasan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penghitungan atau olah data dilakukan, hasil dan implikasinya adalah sebagai berikut:

Kenaikan PDRB per Kapita Jawa Timur 2005-2011

Perkembangan PDRB per kapita Jawa Timur senantiasa mengalami pertumbuhan yang positif dengan laju pertumbuhan rata-rata 4%-5% setiap tahunnya. Perkembangan PDRB per kapita Jawa Timur ditunjukkan dengan grafik di bawah ini:

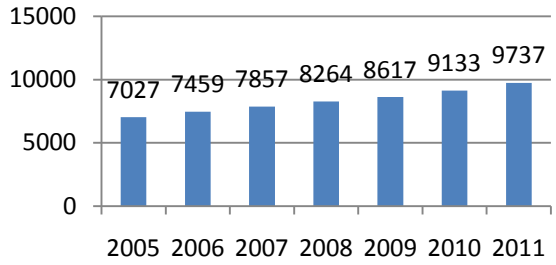

Gambar 3. Perkembangan PDRB per Kapita Jawa Timur (atas dasar harga konstan tahun 2000) (dalam ribu Rupiah)

Berdasarkan grafik di atas, PDRB per kapita Jatim senantiasa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi ada pada tahun 2011 dimana PDRB per kapita Jatim meningkat sebesar 6,61% dibanding tahun sebelumnya yakni dari Rp 9.133.000,- ke Rp 9.737.000,-. Hal ini mengindikasikan bahwa ada konsistensi peningkatan pendapatan masyarakat Jatim secara rata-rata dan riil (tingkat inflasi sudah dieliminasi) dari tahun 2005 hingga tahun 2011.

4.1.2 Tingkat Inflasi Komoditas Perguruan Tinggi / Akademi di Kota Malang

Tingkat inflasi komoditas perguruan tinggi / akademi dapat digunakan sebagai persentase perubahan harga pendidikan tinggi secara rata- rata setiap tahunnya. Seperti inflasi barang dan jasa lainnya, angka inflasi pendidikan tinggi diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi.

Sebagai kota pendidikan, setiap tahun komoditas pendidikan tinggi di Kota Malang mengalami inflasi meskipunya lajunya fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yakni sebesar 20,61%. Artinya harga atau biaya pendidikan naik rata-rata 20,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan laju inflasi di tahun berikutnya yakni tahun 2007 bukanlah dipandang sebagai sebuah deflasi, tetap terjadi inflasi pada tahun 2007 hanya saja lajunya menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,56% atau dengan kata lain harga pendidikan

tinggi naik sebesar 13,56% dibandingkan tahun 2006. Jadi, dari tahun ke tahun, pendidikan tinggi senantiasa mengalami kenaikan harga secara rata-rata meskipun lajunya berbeda-beda.

Perkembangan Permintaan Pendidikan Tinggi di Kota Malang

Permintaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi dibagi menjadi dua macam yakni permintaan potensial dan permintaan efektif. Permintaan potensial untuk pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai jumlah konsumen yang bersedia membayar di tingkat harga yang sama sedangkan permintaan efektif merupakan jumlah konsumen yang benar-benar akan melakukan transaksi setelah terjadi proses seleksi akibat adanya batasan pagu dari perguruan tinggi / universitas. Permintaan potensial ditunjukkan dengan jumlah peminat yang mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa pada jalur SNMPTN yang merupakan jalur reguler untuk memasuki universitas, diasumsikan masing-masing dari mereka memiliki kerelaan untuk membayar di tingkat harga yang sama, sedangkan permintaan efektif ditunjukkan dengan jumlah mahasiswa yang melakukan daftar ulang, mereka dianggap sebagai jumlah konsumen yang berada pada titik equilibrium pasar.

Secara keseluruhan atau agregat, permintaan potensial pendidikan tinggi di Kota Malang pada umumnya meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga permintaan efektifnya. Namun ada *lag* yang sangat curam antara permintaan potensial dengan permintaan efektif yang butuh penelitian dan pembahasan lebih lanjut.

Klasifikasi Pendidikan Tinggi sebagai Barang Mewah Berdasarkan Nilai Elastisitas Pendapatannya

Permintaan potensial pendidikan tinggi di Kota Malang secara agregat pada umumnya menghadapi permintaan yang cenderung elastis dimana perubahan permintaan melebihi perubahan pendapatan. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi masih terkategori sebagai barang mewah dimana ketika terjadi peningkatan pendapatan masyarakat maka permintaannya akan ikut meningkat dan peningkatannya melebihi laju peningkatan pendapatan dengan koefisien rata-rata sebesar 1,02.

Anomali elastisitas pendapatan atas permintaan pendidikan tinggi di Kota Malang terdapat pada tahun 2007. Bahwa ketika pendapatan masyarakat naik 5,34% yang terjadi adalah penurunan permintaan sebesar 4,91%. Identifikasi masalah untuk kasus ini dapat ditelaah dengan mencari momen atau kejadian apa yang terjadi pada tahun tersebut. Elastisitas negatif yang terjadi pada tahun 2007 tersebut tidak serta merta membawa analisis pada kesimpulan bahwa pada tahun tersebut masyarakat menganggap pendidikan merupakan barang inferior. Faktor politis perlu dipertimbangkan yakni mengenai RUU status Pendidikan Tinggi yang pada tahun tersebut yakni tahun 2007 marak diperbincangkan masyarakat. RUU mengenai status Pendidikan Tinggi sebagai BHMN (Badan Hukum Milik Negara) dengan sistem pengelolaan BHP (Badan Hukum Publik).

Penurunan permintaan mahasiswa pada tahun 2007 terbesar disumbang oleh Universitas Brawijaya. Permintaan bangku kuliah pada tahun 2007 menurun 12,09% dibanding tahun sebelumnya. Penguatan dugaan bahwa RUU mengenai status PTN sebagai BHMN mempengaruhi permintaan juga dapat dilihat dari penurunan permintaan di UB tahun 2007 tersebut dibarengi dengan SK DIKTI nomor 4022/D/T/2007 yang menyatakan bahwa Universitas Brawijaya telah memenuhi syarat untuk menjadi BHMN.

UM selaku kompetitor UB memiliki pola permintaan yang saling bersubstitusi jika dilihat dari perubahan peminat. Ketika peminat UB di jalur SNMPTN meningkat, maka peminat UM turun dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya ketika peminat UM meningkat, peminat UB turun. Permasalahan permintaan di masing-masing universitas adalah masalah *market share* dari total pasar PTN di Kota Malang. Ketika *market share* UB meningkat maka disertai dengan penurunan *market share* UM demikian pula sebaliknya, ketika *market share* UB menurun maka *market share* di UM meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kelebihan Permintaan Pendidikan Tinggi di Kota Malang Sebagai *Lag* Antara Permintaan Potensial dan Permintaan Efektif

Hal yang menarik dari analisis mengenai permintaan efektif adalah keberadaan *excess demand* atau kelebihan permintaan pada setiap tahunnya yang besarnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan daya tampung. Grafik di bawah ini akan menunjukkan perbandingan

permintaan potensial dan efektif serta sekaligus menggambarkan tingkat penyerapan permintaan dari permintaan potensial ke permintaan efektif.

Perlu dicermati bahwa setiap tahunnya permintaan pendidikan tinggi dihadapkan dengan kelebihan permintaan yang sangat tinggi. Tingkat penyerapan permintaan yang hanya 11,17 per tahun secara rata-rata mengakibatkan kelebihan permintaan pendidikan tinggi melalui jalur reguler mencapai 88,83% per tahun secara rata-rata. Secara ekonomis, terjadi kelangkaan bagi konsumen karena bangku yang tersedia di jalur reguler jauh lebih sedikit daripada yang diminta. Kelebihan permintaan ini tidak hanya dihadapi oleh salah satu institusi tetapi kedua institusi (UB dan UM) sama-sama menghadapi kelebihan permintaan pada setiap tahunnya. Kelebihan permintaan yang terjadi pada masing-masing universitas inilah yang bisa digunakan sebagai pangsa pasar jalur *non-reguler* penerimaan mahasiswa.

Permintaan Potensial Pendidikan Tinggi di Kota Malang tidak Responsif terhadap Perubahan Harga

Berdasarkan reaksi perubahan permintaan potensial terhadap perubahan harganya, pendidikan tinggi di Kota Malang setiap tahunnya menghadapi permintaan yang inelastis. Hal ini berarti permintaannya kurang reaktif terhadap perubahan harga. Perubahan harga yang ditunjukkan melalui tingkat inflasi tidak banyak mempengaruhi permintaan masyarakat akan bangku perkuliahan.

Permintaan pendidikan tinggi di Kota Malang dari tahun ke tahun memiliki karakteristik yang inelastis terhadap harga meskipun nilai koefisiennya berubah-ubah. Nilai koefisien elastisitas harga yang positif menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bukanlah barang normal seperti pada umumnya. Barang normal memiliki koefisien elastisitas yang negatif di mana permintaan dan harga memiliki hubungan yang berlawanan, jika harga naik maka permintaan akan turun, sebaliknya jika harga turun permintaan akan naik. Hampir di setiap tahun, kenaikan harga pada pendidikan tinggi dibarengi dengan kenaikan permintaan. Hubungan antara permintaan dan harga yang semacam ini terjadi pada kasus barang mewah atau *luxury good* sejalan dengan temuan sebelumnya pada perhitungan elastisitas pendapatan.

Permintaan Efektif Pendidikan Tinggi di Kota Malang Inelastis terhadap Perubahan Harga Sejalan dengan Permintaan Potensialnya

Elastisitas harga dari permintaan efektif menunjukkan pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas ekuilibrium. Jadi, elastisitas harga dari permintaan efektif menunjukkan pengaruh harga terhadap permintaan yang terjadi setelah adanya mekanisme seleksi dan *dealing* harga antara produsen dan konsumen

Pada umumnya, permintaan efektif pendidikan tinggi di Malang menghadapi permintaan yang inelastis sejalan dengan permintaan potensialnya. Namun pada tahun 2010, nilai koefisien elastisitasnya naik dan terkategori sebagai permintaan yang elastis terhadap harga. Jika ditelusuri penyebabnya adalah terjadinya perubahan permintaan efektif yang cukup tinggi. Perubahan permintaan efektif tersebut disumbang oleh kenaikan permintaan efektif di UB di mana pada saat itu UB memperbesar kapasitasnya untuk jalur reguler.

Permintaan efektif yang konsisten naik dari tahun ke tahun disertai dengan inflasi pendidikan tinggi yang konsisten terjadi setiap tahun mengakibatkan UB memiliki permintaan yang elastisitas positif terhadap harga. Karakteristik utama dari permintaan efektif di UB adalah inelastis dan kalaupun pada tahun 2008 dan 2010 angka elastisitas menunjukkan kategori elastis, elastisitas tersebut bentuknya positif, seperti karakteristik barang mewah, kenaikan harga diikuti dengan kenaikan permintaan. Situasi seperti ini disebut sebagai *Paradoks Giffen* yakni situasi dimana kenaikan harga barang mendorong seseorang untuk mengkonsumsinya lebih banyak.

Secara menyeluruh perlu dipahami bahwa ketika kenaikan permintaan efektif lebih dari kenaikan harga, nilai elastisitasnya menjadi tinggi. Artinya kelangkaan berkurang akibat penambahan jumlah daya tampung. Ketika kelangkaan berkurang, barang tersebut menjadi barang yang normal yang reaktif terhadap perubahan harga.

Implikasi Permintaan Pendidikan Tinggi sebagai Barang Mewah

Seperti barang konsumsi yang lain pada umumnya, pendidikan tinggi memiliki elastisitas positif terhadap pendapatan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, permintaan terhadap pendidikan tinggi juga semakin tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada permintaan pendidikan tinggi di Kota Malang. Permintaan akan bangku perkuliahan pada pasar reguler terus

meningkat seiring dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, permintaan pendidikan tinggi memiliki elastisitas yang tinggi terhadap *income* yang mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi merupakan barang mewah.

Kecenderungan permintaan pendidikan tinggi terklasifikasi sebagai barang mewah ditunjukkan melalui hubungan searah antara permintaan dan pendapatan di mana proporsi kenaikan permintaan lebih besar daripada pendapatan. Kenaikan permintaan yang besar jika tidak diikuti dengan ketersediaan barang (dalam kasus ini adalah bangku pendidikan tinggi) akan menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan tersebut nantinya akan menstimulir harga untuk naik dan menjadikan karakteristik barang menjadi semakin mewah.

Nilai elastisitas yang tinggi akibat permintaan yang tinggi ini bisa dipandang sebagai satu sisi positif sekaligus satu sisi negatif. Sisi positif dari permintaan pendidikan tinggi yang meningkat adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang dapat diartikan juga meningkat. Namun perlu diingat bahwa elastisitas penghasilan adalah tingkat perubahan relatif atas jumlah barang yang diminta yang didapatkan dengan cara membagi perubahan proporsional dari barang yang diminta dengan perubahan proporsional penghasilan secara nominal. Ketika kenaikan proporsi permintaan ditandingkan dengan kenaikan proporsi pendapatan hasilnya lebih dari satu dan ada kecenderungan meningkat angkanya, maka pendidikan akan menyerap proporsi penghasilan masyarakat yang lebih besar. Dibandingkan dengan barang lain yang elastisitas pendapatannya rendah (disebut dengan barang kebutuhan pokok), semakin tinggi kesejahteraan suatu negara, nilai elastisitas bahan pokok akan semakin rendah, berarti proporsi penghasilan yang digunakan rumah tangga untuk bahan pokok rendah, penghasilan tidak hanya terserap pada konsumsi bahan pokok saja. Demikian pula dengan pendidikan tinggi, semakin tinggi nilai elastisitas pendapatannya maka semakin besar proporsi pendapatan rumah tangga yang dihabiskan untuk mengkonsumsi pendidikan tinggi.

Meskipun nilai elastisitas pendapatan yang terlalu tinggi tidak baik, nilai elastisitas pendapatan atas permintaan tinggi juga tidak boleh negatif. Jika bernilai negatif seperti yang terjadi pada tahun 2007, perlu diteliti penyebabnya, apakah pendapatan masyarakat yang menurun ataukah permintaannya. Pada tahun 2007, pendidikan tinggi di Kota Malang menghadapi permintaan yang menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan permintaan yang drastis tersebut disumbang oleh salah satu institusi yakni UB yang mana di tahun yang sama UB bergegas menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Dikti sebagai respon atas UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Institutional Reform pada institusi perguruan tinggi di Indonesia memiliki beberapa tahapan. Pasca krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, tahun 1999 pemerintah mengeluarkan PP No. 61 tahun 1999 yang berisikan tentang ide untuk otonomi institusi pendidikan tinggi, jadi institusi perguruan tinggi diberikan hak untuk mengelola perekonomiannya sendiri. Peran pemerintah di sini sebagai pembeli jasa, tak lagi sebagai pemilik.

Beberapa ahli berpendapat bahwa transformasi struktur organisasi perguruan tinggi menjadi BHMN sebagai bagian dari BHP (Badan Hukum Pendidikan) bukanlah kapitalisasi atau privatisasi pada sektor pendidikan. Secara konseptual memang demikian, konsep BHMN dengan tata kelola administrasi BLU (Badan Layanan Umum) dirancang agar perguruan tinggi memiliki otonomi untuk berkembang di mana institusi perguruan tinggi diperbolehkan menatausahakan keuangannya sendiri dengan transparansi yang cukup jelas sebagaimana diatur dalam UU no 20 tahun 2003 tersebut. Pandangan negatif mengenai BHMN tersebut dipicu karena adanya *gap* hukum dan ambiguitas. Hukum keuangan negara no 17 tahun 2003 tidak mencantumkan pembiayaan publik untuk institusi otonomi, padahal bagaimana mungkin intitusi perguruan tinggi negeri tidak dibiayai pemerintah bila staf dan sumber dayanya merupakan pegawai negeri. Ambiguitas inilah yang memicu masyarakat menilai negatif struktur perguruan tinggi BHMN, dikhawatirkan universitas yang bertransformasi menjadi BHMN akan menjadi mahal karena otonomi kampus yang diperkirakan akan serba mandiri dalam hal pembiayaan.

Universitas Brawijaya sendiri mengusulkan proposal BHMN pada tahun 2004 dan setelah melalui proses peninjauan baru disetujui tahun 2007. Sementara UM, tetap dengan statusnya sebagai universitas dengan sistem tata keuangan BLU pada tahun tersebut. Bersamaan dengan persetujuan status BHMN di UB tersebut, permintaan bangku kuliah di UB menurun. Meskipun SNMPTN merupakan jalur paling murah, masyarakat mengkhawatirkan kenaikan biaya yang signifikan pada UB setelah menyandang status BHMN. Kemudian nama BHMN tersebut disempurnakan menjadi BHPP (Badan Hukum Pendidikan Pemerintah) karena adanya penyempurnaan *gap* hukum seperti yang dijelaskan tadi. Dengan bentuk BHPP, entitas pendidikan

tinggi melakukan pengelolaan pendanaan dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dimana ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan pembiayaan pendidikan tinggi.

Kekhawatiran masyarakat mengenai status perguruan tinggi tersebut sifatnya hanya sesaat. Seiring dengan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada tahun-tahun berikutnya, permintaan kembali meningkat secara pesat. Meningkatnya permintaan akan pendidikan tinggi yang proporsinya melebihi peningkatan pendapatan tersebut membawa pendidikan tinggi pada kelebihan permintaan yang tinggi pada setiap tahunnya. Respon penawaran dari universitas selaku produsen pada keadaan seperti ini adalah dengan melanggengkan jalur-jalur mandiri atau *non-reguler* sebagai politik ekonomi universitas.

Keberlangsungan Jalur Non-Reguler Akibat Kelangkaan "Buatan" di Pasar Reguler

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kenaikan permintaan yang didukung dengan kenaikan pendapatan masyarakat ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas penerimaan mahasiswa pada jalur reguler. Akibatnya terjadi kelangkaan yang terus menerus pada jalur reguler yang semestinya tidak terjadi. Kelangkaan tersebut tidak akan terus berlanjut jika perluasan pagu tidak disertai dengan pemecahan pagu ke dalam dua pasar.

Jika pendidikan tinggi menghadapi permintaan yang tinggi, maka sebagai konsekuensinya, penawaran akan meresponnya dengan cara perluasan pagu atau kapasitas produksi. Hal ini telah dilakukan, institusi perguruan tinggi memperluas pagu penerimaan mahasiswanya setiap tahun namun tetap saja hanya sedikit permintaan yang mampu terserap karena perluasan pagu tidak seimbang dengan kenaikan permintaan yang pesat sehingga kelangkaan terus menerus terjadi. Selain itu, pemecahan pagu ke dalam dua pasar yakni jalur reguler dan *non-reguler*, menyebabkan permintaan di pasar reguler menghadapi kelangkaan. Kelangkaan inilah yang kemudian dapat menjadi pemicu kenaikan harga dalam pendidikan tinggi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai strategi atau politik ekonomi institusi pendidikan tinggi untuk melanggengkan jalur *non-reguler*.

Meskipun daya tampung meningkat, peningkatannya tidak terkonsentrasi pada satu jalur. Keberadaan dua pasar dengan barang yang sama namun harga yang berbeda tentunya disertai keputusan rasional dan preferensi konsumen. Jalur non reguler akan menjadi alternatif pilihan bagi konsumen ketika permintaan mereka tidak menemui ekuilibriumnya pada pasar reguler. Konsumen yang dihadapkan pada dua pasar dengan barang yang sama tetapi harga yang berbeda tentunya akan mengutamakan pasar yang harganya lebih murah dibandingkan dengan pasar yang harganya mahal.

Dibukanya jalur penerimaan mahasiswa *non-reguler* sebagai respon dari *excess demand* tidak hanya memberikan benefit pada pihak universitas sendiri tetapi juga memberikan benefit kepada calon konsumen yang tidak terserap di pasar reguler Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya peminat jalur *non-reguler*, yang mana karakteristik pagu dan pemintanya sama dengan jalur reguler yakni adanya *lag* yang cukup tinggi antara keduanya meskipun tidak setinggi di pasar reguler.

Tabel 1: **Pagu dan Peminat Jalur Reguler dan Non Reguler UM dan UB**

Tahun	**Pagu Reguler**		**Pagu non-reguler**		**Total Pagu**		**Peminat Reguler**		**Peminat non-reguler**	
	UB	UM	UB	UM	UB	UM	UB	UM	UB	UM
2005	3645	N/A	3415	N/A	7060	2868	34452	13580	10898	30
2006	3722	N/A	4269	N/A	7991	3457	32517	15356	11556	112
2007	3974	N/A	3357	N/A	7331	3447	28449	16412	8794	286
2008	5284	N/A	4196	N/A	9480	3865	32574	16638	10839	1884
2009	5193	N/A	3823	N/A	9016	4582	32370	20308	15241	19853
2010	7892	N/A	7623	N/A	15515	4401	42768	17909	22648	9769
Rata-rata	***4952***	***N/A***	***4447***	***N/A***	***9399***	***3770***	***33855***	***16701***	***13329***	***5322***

Sumber: Statistik Mahasiswa UM dan Data Akademik UB (www.akademik.ac.id) diolah

Dalam lima tahun terakhir baik, pendidikan tinggi di Malang memiliki kapasitas tampung atau pagu yang meningkat lebih dari dua kali lipat. Peningkatan *supply* ini bukan terjadi tiba-tiba melainkan karena ada stimulasi dari pasar yakni tingginya permintaan potensial di jalur reguler namun hanya sedikit yang mampu diserap setiap tahunnya. Permintaan masyarakat yang tinggi namun jalur reguler tidak mampu menampung permintaan yang tinggi tersebut memberikan peluang kepada pihak institusi perguruan tinggi sebagai produsen untuk menampung permintaan konsumen pada jalur non reguler yang tarifnya relatif lebih mahal.

Pada jalur reguler, UB lebih banyak diminati daripada UM (ditunjukkan dengan *market share* yang didominasi oleh UB) seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Namun ada yang perlu dicermari pada jalur non-reguler pada kedua universitas, UM sejak pertama kali membuka jalur non-reguler yakni pada tahun 2009, permintaan atas jalur tersebut langsung sangat tinggi. Hal ini dikarenakan selisih harga antara jalur reguler dengan non-reguler di UM tidak setinggi selisih harga antara jalur reguler dengan non-reguler di UB. Hal ini beresiko bagi UB sebagai institusi kompetitor UM yang di mata konsumen sifatnya substitutif. Pada jalur reguler posisi UB lebih diminati namun belum tentu hal tersebut juga terjadi di jalur non reguler jika selisih harga di kedua jalur di UB sangat tinggi. Oleh karena itu, UB harus berhati-hati dalam strategi penetapan harga pada jalur non reguler.

Selisih harga yang tinggi pada kedua jalur (reguler dan non reguler) berpotensi untuk menimbulkan *lobby-lobby* secara informal akibat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Konsumen yang diterima di jalur non reguler melakukan *lobbying* atas harga misalnya dengan meminta penundaan pembayaran atau bahkan keringanan. Hal ini bisa menjadi ironi atas tujuan pembukaan jalur non reguler yang secara ekonomis adalah memanfaatkan surplus konsumen. Ketika *lobbying* sering terjadi maka harga yang telah dipatok tidak mencerminkan harga pasar. Harga pasar yang bias tersebut nantinya akan berpotensi pada eksistensi pasar gelap. Keberadaan pasar gelap tersebut tentunya merugikan konsumen yang benar-benar bersedia membayar di tingkat harga yang sama dan mampu secara akademis pada permintaan pendidikan tinggi di institusi tersebut. Tentunya negosiasi harga pasca penerimaan mahasiswa di jalur non reguler dalam bentuk penundaan dan keringanan juga berpotensi merugikan produsen karena dengan demikian dapat dikatakan produsen gagal dalam tujuan ekonomisnya untuk mendapatkan surplus konsumen.

Kemudahan Menaikkan Harga Pendidikan Tinggi pada Permintaan yang Inelastis terhadap Harga

Universitas dalam hal ini produsen memiliki *market share* yang menuntut mereka untuk saling berkompetisi. Dalam penelitian ini, UB dan UM memiliki pola permintaan yang substitutif di mana ketika permintaan UB meningkat maka permintaan UM menurun, dan sebaliknya. Hal tersebut merupakan contoh fenomena yang dihadapi perguruan tinggi sejenis lainnya di Indonesia. Masing-masing universitas dituntut untuk meningkatkan mutu dan eksistensinya sehingga kompetisipun terjadi. Sebagai sesama produsen, suatu universitas merupakan kompetitor bagi universitas lainnya. Persaingan dalam mendapatkan mahasiswa mutlak dilakukan. Persaingan tersebut tidak hanya segi kuantitas saja yang dipersaingankan, kualitas mahasiswa sebagai input juga menjadi kriteria sebagai strategi dan upaya peningkatan mutu.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan tentu saja tidak terjadi begitu saja, ada modal yang dibutuhkan oleh universitas untuk meningkatkan mutu tersebut. Semakin besar modal maka semakin besar pula peluang suatu universitas untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sekaligus sebagai penarik input yang berkualitas. Status perguruan tinggi sebagai BHP mampu mendukung upaya tersebut. Perguruan tinggi diperbolehkan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal misalnya perusahaan untuk memajukan kampusnya tanpa dicabut atau dikurangi proporsi pembiayaannya oleh pemerintah. Suatu keuntungan untuk universitas yang memiliki modal sosial tinggi dalam membangun kepercayaan dengan perusahaan. Jadi dengan status BHP, perguruan tinggi dapat mencari sumber dana tambahan selain yang didapatkan dari subsidi atau pembiayaan pemerintah.

Masalah pembebanan harga kepada konsumen bukanlah suatu masalah yang besar mengingat karakteristik pendidikan tinggi di Kota Malang pada khususnya. Sifat permintaan pendidikan tinggi yang inelastis terhadap harga mempermudah universitas sebagai produsen untuk menaikkan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa. Suatu universitas dengan biaya operasional tinggi belum tentu SPPnya juga tinggi atau mahal, tergantung subsidi yang diberikan pemerintah dan sumber pendanaan mandiri dari pihak universitas sendiri. Ketika formula pembiayaan dari

pemerintah tidak ada kejelasan secara eksplisit, sumber pendanaan mandiri juga sulit misalnya rendahnya akses suatu universitas untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan atau tidak berkembangnya unit-unit bisnis dari universitas sendiri, maka suatu kewajaran jika biaya yang dibebankan pada mahasiswa menjadi tinggi. Apalagi ketika permintaan pendidikan tinggi menghadapi permintaan yang inelastis atau tidak responsif terhadap harga, tentu hal tersebut memperkuat posisi universitas untuk menentukan besarnya *user charges* kepada konsumen.

Konsumen Perguruan Tinggi di Kota Malang Sebagai *Price Taker* yang Tidak Responsif terhadap Perubahan Harga

Pada pasar pendidikan tinggi, konsumen tidak memiliki daya tawar terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Apalagi ketika tingkat persaingan perebutan barang sangat ketat, daya tawar konsumen akan menjadi semakin rendah. Posisi konsumen dalam menghadapi harga sebatas *take it or leave it*. Harga telah ditetapkan di awal oleh produsen dan dalam jangka pendek, harga tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang diminta. Ketika pasar menghadapi *excess demand* setiap tahunnya, barulah harga terpengaruh dan terstimulir untuk meningkat.

Secara agregat, permintaan pendidikan tinggi terutama di Kota Malang tidak terpengaruh terhadap laju perubahan harga. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada pada penelitian Leslie dan Brinkman dalam *Student Price Response in Higher Education: The Student Demands Studies* (1987) yang mengemukakan bahwa tingkat pendaftaran memiliki hubungan negatif dengan harga yang dibebankan kepada mahasiswa, terutama biaya kuliah (*tuition*). Pada penelitian ini, pendapat tersebut dapat diterima dalam analisis permintaan secara parsial masing-masing universitas, namun tidak secara agregat.

Temuan pada penelitian ini juga tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang sejenis di negara lain yakni di *United States* oleh Campbell dan Siegel (1967). Penelitian tersebut menghasilkan temuan yang selaras dengan teori bahwa tingkat pendaftaran (permintaan) berhubungan positif dengan pendapatan dan berhubungan negatif dengan harga. Meskipun dengan metode yang berbeda, data yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian Campbell dan Siegel sama yakni pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan tingkat pendaftaran, namun hasilnya berbeda.

Perbedaan yang terjadi pada hasil penelitian ini disebabkan karena kedua penelitian dilakukan di negara yang berbeda. Amerika Serikat sebagai negara maju dengan sistem pendidikan yang sudah lebih dahulu dibangun, pendidikan tinggi sangat kompetitif dalam hal harga. Perubahan yang terjadi pada harga akan mempengaruhi perubahan permintaan dan arahnya berlawanan. Berbeda dengan di Indonesia sebagai negara berkembang, di mana pendapatan masyarakat mulai membaik, tingkat harapan masyarakat pada pendidikan tinggi juga semakin tinggi. Konsumen pendidikan tinggi di negara maju sangat memperhitungkan *opportunity cost* dalam mengenyam pendidikan tinggi, sedangkan di Indonesia sebagai negara berkembang, pendidikan tinggi dianggap sebagai batu pijakan untuk memperbaiki taraf hidup tanpa memperhitungkan *opportunity cost* nya.

Situasi yang dijumpai pada respon permintaan pendidikan tinggi di negara Kota Malang sebagai bagian wilayah dari negara berkembang menyerupai *"Paradoks Giffen"*. Ketika harga naik, permintaan juga ikut naik, tidak seperti kebanyakan barang normal. Kenaikan permintaan yang tidak responsif terhadap harga tersebut diakibatkan karena kuatnya efek dari kenaikan pendapatan.

Pendidikan Tinggi Sebagai Barang Investasi dengan Asimetri Informasi

Permintaan pendidikan tinggi inelastis terhadap perubahan harga, berapapun harganya, permintaan tetap tinggi. Dari segi respon terhadap perubahan pendapatan, pendidikan tinggi memiliki permintaan yang elastis positif. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap pendidikan tinggi merupakan suatu barang investasi. Ada pengeluaran yang diinvestasikan dengan harapan ada imbal hasil pada kemudian hari yang akan mereka dapatkan yakni tingkat upah yang lebih layak. Semakin tinggi "harga" yang diinvestasikan, harapannya semakin tinggi pula imbal hasil yang didapatkan nantinya. Karena dianggap sebagai barang investasi tersebut, meskipun dari sisi respon permintaan terhadap perubahan pendapatan terkategori sebagai barang mewah, permintaannya tidak responsif terhadap harga.

Dalam melakukan konsumsi terhadap pendidikan tinggi, masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup memadahi. Konsumen tidak memiliki standar yang jelas dalam membandingkan produk pada masing-masing universitas. Misalnya untuk membandingkan lebih

baik mana investasi pada universitas A atau B, mereka hanya bisa membandingkannya lewat pencarian informasi secara parsial yang diperoleh dari mulut ke mulut atau dari kesimpulan sendiri atas informasi-informasi yang mereka kumpulkan.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam pembedaan kualitas produk pendidikan tinggi adalah akreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi). Akreditasi yang terstandarisasi oleh pemerintah adalah akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Seharusnya hasil akreditasi tersebut dipublikasikan dan disebarluaskan beserta informasi lainnya mengenai perguruan tinggi misalnya SPP dan uang gedung agar masyarakat bisa membanding-bandingkan investasi mana yang cocok dan layak mereka ambil. Sehingga informasi yang mereka dapatkan banyak dan konsumen tidak membeli produk dengan harga yang buta.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon permintaan pendidikan tinggi terhadap perubahan harga dan pendapatan masyarakat. Data yang digunakan berasal dari hasil dokumentasi dua institusi perguruan tinggi sampel di Kota Malang yakni Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya serta dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Pendidikan tinggi merupakan barang yang elastis positif (*highly positive elastic*) terhadap perubahan pendapatan. Berdasarkan nilai elastisitas pendapatan dari permintaannya, pendidikan tinggi di Kota Malang tergolong pada barang mewah dan nilai elastisitasnya memiliki kecenderungan untuk terus naik. Meskipun barang mewah, permintaan tidak reaktif terhadap harga karena masyarakat menganggapnya sebagai barang investasi.
2. Permintaan masing-masing universitas yang diteliti di Kota Malang secara parsial tidak memiliki pola khusus. Namun jika kedua permintaan digabungkna, permintaannya memiliki pola yang substitutif. Dari tahun ke tahun ada perubahan preferensi masyarakat dalam menentukan pilihan atas universitas yang dipilih
3. Permintaan yang tinggi pada jalur reguler (SNMPTN) yang tidak disertai dengan pagu reguler yang memadahi menyebabkan adanya *excess demand*. Permintaan potensial yang tidak tertampung pada permintaan efektif di jalur reguler digunakan sebagai politik ekonomi universitas untuk membuka jalur *non reguler*.
4. Pendidikan tinggi di Kota Malang menghadapi permintaan yang inelastis dimana permintaan tidak reaktif terhadap perubahan harga. Pada pasar, posisi konsumen adalah sebagai *price taker*. Hal ini memperlemah daya tawar konsumen sehingga pada dasarnya sangat mudah bagi produsen untuk menaikkan harga.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai tindak lanjut dalam penelitian ini adalah yang pertama, pendidikan tinggi yang memiliki nilai elastisitas positif terhadap pendapatan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena peningkatan pendapatan masyarakat secara rata-rata tidak serta merta menggambarkan pemerataan pendapatan. Artinya harus ada intervensi pemerintah agar masyarakat yang pendapatannya di bawah rata-rata mampu menjangkau akses menuju pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang memiliki motif ekonomi dalam menjalankan usahanya harus mempertimbangkan segi sosial seperti *corporate social responsibility*. Institusi perguruan tinggi telah mendapatkan pendapatan dari masyarakat yang membayar lebih pada jalur non-reguler, dari sini diharapkan pihak intitusi bisa menyisihkannya untuk memberikan skema beasiswa maupun subsdisi silang kepada mahasiswa yang berasal dari jalur lain. Selama ini, beasiswa hanya berasal dari DIKTI dan perusahaan yang menjalin kerja sama dengan universitas. Peran pemerintah sebagai regulator diperlukan dalam skema CSR ini untuk bisa membuat regulasi yang harus dijalankan oleh pihak institusi.

Kedua, strategi yang dapat diterapkan pemerintah untuk menanggapi permintaan pendidikan yang inelastis adalah melakukan stimulasi pada perguruan-perguruan tinggi untuk berkompetisi tidak hanya pada masalah kualitas, tetapi juga masalah harga. Hal ini dapat dilakukan

misalnya dengan akreditasi yang transparan dan pelaporan tarif SPP per tahun masing-masing universitas kepada pihak Dikti. Sehingga nantinya pihak DIKTI bisa mempublikasikan rating dan biaya masing-masing universitas melalui berbagai media misalnya melalui *website* resmi DIKTI.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Jawa Timur. 2011. *Indeks Harga Konsumen 7 Kota di Jawa Timur 2010*

BPS Jawa Timur. 2011. *PDRB Jatim 2010*

Campbell, Robert., Siegel, Barry N. 1967. The Demand for Higher Education in the United States. *The American Economic Review, vo. 57 no. 3 (1967): 482-494.* http://www.jstor.org/stable/1812115 diakses pada 7 Oktober 2012

Clotfelter, Charles T., Ehrenberg, Ronald G., Getz, Malcolm., Siegfried, John J. 1991. Challenges in Higher Education. Chicago: University of Chicago Press. http://www.nber.org/books/clot91-1 diakses pada 30 Juli 2012

Duchesne, Nonneman, W. 2000. The Demand for Higher Education in Belgium.*Economics of Education Review, vol. 17 no. 2 (1998): 211-218*. http://ideas.repec.org/a/eee/ecoedu/v17y1998i2p211-218.html diakses pada 25 Juli 2012

Fisher, Ronald C. *State and Local Public Finance*. 1996. New York: A Times Mirror Higher Education Group, Inc.

Golpek, Filiz. 2012. Price of higher education and individual demand. Social and Behavioral Sciences, Volume 41 (2012): 349-356. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812009202 diakses pada 22 Agustus 2012

Jackson, Gregory A., Weathersby, George B. 1975. Individual Demand for Higher Education: A Review and Analysis of Recent Empirical Studies.*The Journal of Higher Education*, Vol. 46, No. 6 (Nov. - Dec., 1975): 623-652.http://www.jstor.org/stable/1979059 diakses pada 7 Oktober 2012

Juanda, Ahmad., Lestari, Nikki Vertik. 2012. Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran (Studi Kasus Pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2 No. 1 (April 2012): 227-241.

Knudsen, Odin K., Servelle, Paul J., 1978. The Demand for Higher Education at Private Institutions of Moderate Selectivity. *The American Economist*, Vol. 22, No. 2 (Fall, 1978: 30-34. http://www.jstor.org/stable/25603175 diakses pada 7 Oktober 2012

Leslie, Larry L., Brinkman, Paul T., 1987. Student Price Response in Higher Education: The Demand Studies.*The Journal of Higher Education, Vol. 58, No. 2 (Mar. - Apr., 1987): 181-204*. http://www.jstor.org/stable/1981241 diakses pada 25 Juli 2012

Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Munadi, Muhammad., Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. www.menkokesra.go.id/node/337diakses pada 9 September 2012.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.* www.dikti.go.id/files/atur/PP61-1999.pdf diakses pada 9 September 2012.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf diakses pada 9 September 2012*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan.www.dikti.go.id/files/atur/UU0-20039Sisdiknas.pdf diakses pada 9 September 2012*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah no 17 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.*www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf*diakses pada 9 September 2012*

Rosen, Harvey S. 2008. *Public Finance (8th edition)*. New York: Mc Graw Hill International Edition.

Savoca, Elizabeth. 1990. Another Look at the Demand for Higher Education: Measuring the Price Sensitivity of the Decision to Apply to College. *Economics of Education Review Vol 9. No. 2 (1990): 123-134*. http://dx.doi.org/10.1016/0272-7757(90)90040-C Science Direct diakses pada 20 Agustus 2012

Stiglitz, Joseph E. 2000. *Economics of The Public (3rd edition).* New York: W.W Norton Company

Todaro, Michael P., Smith, *Stephen C.* 2006. *Pembangunan Ekonomi (Jilid 1)*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Universitas Brawijaya. 2010. *UB Dalam Angka 2009*

Universitas Brawijaya. 2005. *Daya Tampung dan Peminat UB 2005/2006*

Universitas Brawijaya. 2006. *Daya Tampung dan Peminat UB 2006/2007*

Universitas Brawijaya. 2007. *Daya Tampung dan Peminat UB 2007/2008*

Universitas Brawijaya. 2008. *Daya Tampung dan Peminat UB 2008/2009*

Universitas Brawijaya. 2009. *Daya Tampung dan Peminat UB 2009/2010*

Universitas Brawijaya. 2010. *Daya Tampung dan Peminat UB 2010/2011*

Universitas Brawijaya. 2011. *Daya Tampung dan Peminat UB 2011/2012*

Universitas Negeri Malang. 2011. *Statistik Universitas Negeri Malang 2010*

World Bank. 2010. *Indonesia: Higher Education Financing*.

Yulida, Rohana Liza. 2010. *Tinjauan tentang Peralihan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.eprints.undip.ac.id/24084/1/LIZA_ROHANA_YULIDA.pdfdiakses pada 1 Oktober 2012*

Yustika, Ahmad Erani. 2010. *Ekonomi Kelembagaan (Definisi, Teori, dan Strategi)*. Malang: Bayumedia Publishing